



Lindungi Warga agar Bisa Beribadah sesuai Agama dan Kepercayaan

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS), indeks kebebasan berkeyakinan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) termasuk salah satu dari 20 provinsi di Indonesia yang skornya menurun. Sejumlah provinsi yang skor indeksnya rendah di antaranya Sumatra Utara, Bengkulu, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur dan beberapa daerah lainnya.

Beberapa poin penilaian yang menjadi indikator di antaranya larangan menjalankan ibadah serta adanya gangguan untuk menjalankan ibadah. Indeks ini berkaitan dengan pelaksanaan pemilu legislatif maupun

pemilihan presiden yang digelar pada April 2019. Meski demikian, BPS tak memiliki alasan ketika skor kebebasan berkeyakinan di Indonesia mengalami penurunan karena lembaga ini hanya menghitung skor berdasarkan indikator yang ada.

Badan Pusat Statistik menilai untuk data indeks demokrasi Indonesia 2018 meningkat 0,28 poin menjadi 72,39. Namun salah satu variabel yakni kebebasan berkeyakinan justru menurun.

Hal ini erat kaitannya dengan sejumlah kebijakan, baik yang dikeluarkan pemerintah maupun kelompok masyarakat, misalnya aturan larangan beribadah, pernyataan

pejabat maupun tokoh masyarakat yang diskriminatif dan sejumlah kebijakan lainnya.

Di DIY persoalan tentang kebebasan beragama merupakan salah satu persoalan yang selalu berulang. Lemahnya pemerintah dalam menegakkan aturan menjadi salah satu penyebab berulangnya kasus.

Contoh kasus terbaru terjadi di Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul. Sekelompok warga menolak keberadaan gereja yang telah berdiri cukup lama dengan alasan pendirian gereja tanpa sosialisasi dan melanggar izin pendirian bangunan (IMB). Setali tiga uang dengan warga,

Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Bupati menganulir IMB yang telah dikeluarkan untuk pembangunan gereja. Bupati Bantul, Suharsono, ber alasan pencabutan dilakukan lantaran ada unsur yang tidak terpenuhi secara hukum saat proses pengajuan IMB.

Tak hanya penolakan gereja, kasus intoleransi juga sering terjadi di Bantul. Beberapa waktu lalu, sekelompok warga membubarkan upacara tradisional yang digelar di pesisir pantai Selatan Bantul. Di Kota Jogja, sejumlah makam umat Kristen juga dirusak orang tak dikenal.

Berbagai persoalan intoleransi yang terjadi

di DIY harus menjadi perhatian serius bagi Pemda DIY dan pemerintah kabupaten/kota yang ada di wilayah ini. Sejumlah kasus intoleransi telah mencederaikan keberagaman dan semangat kebersamaan yang selama ini selalu terjaga.

Pemerintah khususnya aparat penegak hukum harus bersikap tegas dan tidak pandang bulu dalam menegakkan aturan. Pemerintah harus menjadi benteng terdepan dalam upaya melindungi warganya agar bisa menjalankan ibadah sesuai keyakinan mereka masing-masing.

Jika sejak awal pemerintah khususnya aparat penegak hukum bersikap tegas dengan menjatuhkan sanksi bagi

para pelaku intoleransi, maka kasus seperti ini tak akan terus berulang. Dibutuhkan keberanian untuk mewujudkannya.

Merosotnya indeks kebebasan berkeyakinan di DIY dan berulangnya kasus intoleransi harus menjadi catatan sekigus menjadi perhatian pemerintah.

Jangan sampai DIY yang terkenal dengan masyarakatnya yang beragam dan menjunjung tinggi adat istiadat, justru rusak lantaran tak ada upaya nyata dari pemerintah untuk menegakkan aturan khususnya dalam upaya melindungi warganya agar bisa beribadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing.

1.

2.

3.

4.

5.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005